PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN
TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
SYARIF NOOR HIDAYAT, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Adrian, Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Raih Asa Sukses,

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Zainuddin, Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

H.M.N. Purwosutjipto. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Sri Wiludjeng, Irma Nilasari. 2006. *Pengantar Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soedjono Dirjosisworo.1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sudarmo.2011. *Isu – Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika,

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Keuangan Mikro, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342)

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN
TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
SYARIF NOOR HIDAYAT, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344)

Nota Kesepakatan Investasi tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi

**C. Penulisan Hukum**

1. Fajar Riyadi Ardiansyah. 2014. *Kontribusi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Dalam Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial Di DIY*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta,.
2. Furqon, B. A. 2015. *Koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Reklame*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta,

**D. Artikel**

Majalah Edukasi OJK. (Edisi Juni, 2017),

**E. Internet**

_____.2018. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf diakses pada 16 Maret 2019

_____.2016. https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada 16 Maret 2019

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**
SYARIF NOOR HIDAYAT, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
**Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

_____.2017. Novia W. Utami. Mengenal Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi :https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-bung-hatta-sebagai-bapak-koperasi/ diakses pada 15 Juni 2019.

_____.2018. Navirta Ayu, Dunia Perbankan Syari'ah, Mengapa Adanya DSN dan DPS? https://www.kompasiana.com/navirtaayu/5a58a6abf133440bf06e23a3/dunia-perbankan-syari-ah-mengapa-adanya-dsn-dan-dps?page=all diakses pada 17 Juni 2019

_____. 2016. https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada 30 Mei 2019